

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anggaran daerah merupakan gambaran yang berisi tentang kepentingan masyarakat daerah yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien. Hal ini tercantum dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggung jawaban terhadap public juga harus di perlukan, agar proses penganggaran yang bermula dari perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan anggaran daerah dapat di pertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat (Indra Bastian, 2010:69).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, dapat juga menjadi penilaian efektivitas pelaksanaan perencanaan tersebut, sehingga pemerintah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan program-program pemerintah.

Lemahnya perencanaan anggaran dapat menimbulkan *underfinancing* dan *overfinancing*, yang mempengaruhi semua tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah. Anggaran merupakan sebagai alat untuk melaksanakan strategi

organisasi yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyimpangan.

Perencanaan ini maksudnya adalah merencanakan atau memperkirakan pengeluaran dan penerimaan APBD yang akan terjadi pada satu periode tertentu. Lemahnya perencanaan anggaran akan mengakibatkan kurangnya efektivitas pengeluaran APBD. Pengeluaran APBD mempunyai peranan penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menjaga kesinambungan antara program dan kegiatan melalui pola belanja APBD.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana isinya terdapat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Didalam pengelolaan keuangan terdapat perencanaan anggaran di setiap program dan kegiatan perlu dilakukan secara sistematis dan memadukan antara kegiatan dengan program, kebijakan, strategi, sasaran, tujuan, aupun visi dan misi organisasi perangkat daerah. Dengan keterpaduan itu maka efektivitas pengelolaan keuangan akan tercipta sehingga tepat pada sasaran sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Setelah perencanaan dirumuskan, selanjutnya yang harus di tindak lanjuti yakni proses penganggaran. Tahap penganggaran ini merupakan tahap yang rumit dan sering kali disertai dengan unsur-unsur politik, untuk itu perlu diadakannya

pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraannya. Agar anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ada dalam perencanaan, maka diperlukan kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan, pegawai dan pimpinan dalam proses penyusunan anggaran.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 maka untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah harus memenuhi asas-asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya, dan mudah dipahami. Maka dalam penyusunan dan proses pembuatan kebijakan APBD harus terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar memperoleh data yang akurat sehingga dimasukkan dalam perencanaan APBD.

Perencanaan APBD akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah yang berisi kegiatan serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja dan membutuhkan partisipasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan APBD, sehingga dapat dilakukan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Bentuk pepengendalian, pemerikaan dan pengawaan sebagai pertanggung jawaban keuangan yang dipengaruhi oleh Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Maka pertanggung jawaban keuangan atas perencanaan APBD sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sebab

instansi berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang tidak luput dari sorotan masyarakat mengenai pengelolaan keuangannya. Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan evaluasi untuk dijadikan ukuran perbaikan kinerja ditahun berikutnya yang akan berdampak pada besarnya anggaran untuk membiayai kebutuhan instansi baik dalam belanja langsung maupun tidak langsung yang didalamnya mencakup biaya untuk program kegiatan. Pengukuran tersebut didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah LAKIP pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2015-2017.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cibiru 2015-2016

No	Program	Kegiatan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan	50.372.000	50.356.000	56.172.000	56.172.000
2.		Peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan	492.469.610	492.469.610	708.422.000	692.182.700
3		Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup	1.030.759.140	1.030.571.560	1.957.240.000	1.956.572.860

		tingkat kecamatan dan kelurahan				
4		Peningkatan kualitas penanganan ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan	206.420.000	206.418.000	898.852.000	898.492.000
5		Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan	72.965.000	72.963.000	962.908.000	960.911.000
6		Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat				
		Jumlah	1.913.365.750	1.913.158.170	4.647.655.000	4.627.978.560

Sumber : LAKIP Kecamatan Cibiru Tahun 2015-2016

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cibiru Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	25.247.851.180,00	24.640.226.945,00	97,59%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.304.571.523,00	10.037.09.145,00	76,31%
	BELANJA LANGSUNG	14.943.279.657,00	14.602.417.800,00	99,61%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.327.114.206,43	1.263.391.945,00	95,20%
01.02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	146.827.927,32	1221.010.955,00	83,10%
01.06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.816.040,00	16.416.100,00	71,95%
01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	100%
01.09	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	74.259.620,00	73.926.900,00	99,95%
01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	117.026.186,55	113.246.032,00	96,77%
01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101.195.054,00	92.423.122,00	91,33%

01.12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.803.705,00	37.675.790,00	99,66%
01.13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	190.796.879,00	185.887.700,00	97,43%
01.14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	104.638.170,00	102.993.910,00	83,10%
01.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.228.000,00	8.393.000,00	71,95%
01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	172.732.624.000,00	172.674.000,00	98,43%
01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200.550.000,00	200.504.436,00	39,54%
01.19	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	65.240.000,00	65.240.000,00	99,97%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.014.619.186,68	5.959.758.183,00	99,72%
02.07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	0,00%
02.10	Kegiatan pengadaan Mebeulair	40.523.000,00	40.315.000,00	99,34%
02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	230.108.954,08	229.444.808,00	99,48%
02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	494.715.42,69	398.858.322,00	100,00%

02.29	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	-	-	0,00%
02.42	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	226.902.218,80	220.822.920,00	99,19%
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.072.250,00	82.582.500,00	76,41%
03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.750.000,00	35.521.200,00	99,36%
03.05	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	72.322.250,00	47.062.300,00	65,07%
30	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	6.014.619.186,68	5.959.758.183,00	99,09%
28..01	Kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat dan kelurahan	54.676.768,00	54.666.568,00	99,98%
28..02	Kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan	636.661.160,00	636.060.373,00	99,91%
28..03	Kegiatan peningkatan ins=frastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan	2.059.268.564,68	2.052.951.322,00	99,69%
28..04	Kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan	883.219.560,00	879.272.180,00	99,55%
28..05	Kegiatan fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan	2.006.109.750,00	1.984.199.750,00	98,91%

28.07	Kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan	70.552.384,00	53.976.640,00	76,54%
28.09	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	304.161.000,00	298.631.350,00	98,18%
22	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	6.501.224.423,32	6.407.244.12,00	98,55%
22.01	Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW	5.301.852.658,92	5.209.134.290,00	98,25%
22.01	Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK	399.369.120,40	399.206.356,00	99,96%
22.03	Fasilitasi pemberdayaan lingkup karang taruna	399.999.619,00	399.923.567,00	99,98%
22.04	Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM	400.003.030,00	398.979.909,00	99,74%
	JUMLAH	25.247.851.180,00	24.640.226.945,00	97,59%

Sumber : LAKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2015-2017 masih ada yang belum mencapai 100%, ini bisa dilihat pada tahun 2017 Program pelayanan administrasi kegiatan sebesar 95.20% dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan diawal sebesar Rp 1.327.114.206,43 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 1.263.391.945,00 , pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sebesar 83.10% dilihat dari anggaran awal yang telah ditetapkannya sebesar Rp 146.827.927,32 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 122.010.955,00 , pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional presentasenya 71.95% dilihat dari

anggaran awal yang telah ditetapkan sebesar Rp 22.816.040,00 dan yang terealisasi sebesar 16.416.100,00.

Pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan hanya 91.33% dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 101.195.054,00 yang terealisasi hanya Rp 92.423.122,00 , pada kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sebesar 83.10% dilihat dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 104.63.170,00 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 102.993.910,00 , pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 71.95% dilihat dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 21.228.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 8.393.000,00.

Dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya 39.54% dilihat dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 200.550.000,00 dan yang terealisasi hanya Rp 200.504.436,00. Pada program peningkatan disiplin aparatur sebesar 76.41% dilihat dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 108.072.250,00 dan yang terealisasi hanya Rp 82.582.500,00 , pada kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebesar 65.07% dilihat dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 72.332.250,00 dan yang terealisasi hanya 47.061.300,00 , pada kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan hanya 76.54% dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 70.552.384,00 dan yang terealisasi hanya Rp 53.976.640,00.

Tahun 2015 Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan pada kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan

pada kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan anggaran awal yang telah ditetapkannya sebesar Rp 1.030.759.140 dan yang terealisasi hanya sebesar 1.030.571.560. Pada tahun 2016 Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan pada kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan anggaran awal yang ditetapkannya sebesar Rp 708.422.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 692.182.700, pada program yang sama dan kegiatan fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan anggaran awal yang ditetapkannya sebesar Rp 962.908.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 960.911.000.

Program dan kegiatan dikatakan efektif apabila program dan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan target perencanaan awal. Selisih antara perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran masih besar. Masih besar selisih anggaran menandakan bahwa tingkat serapan anggaran pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) di atas belum sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga menimbulkan SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran). Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Semakin besar SILPA, dapat terjadi akibat kurang matangnya perencanaan. Hal ini ditakutkan dapat menghambat proses pembangunan daerah.

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan tidak efektifnya pelaksanaan anggaran yang akan mempengaruhi

efektivitas unit kerja pemerintah. Sedangkan anggaran sebagai alat untuk melaksanakan rencana organisasi dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyimpangan.

Berdasarkan uraian fenomena, peneliti tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya perencanaan anggaran yang berpengaruh pada akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang ada dalam Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Capaian target perencanaan anggaran 31 Desember tahun 2015 - 2017 belum sepenuhnya terealisasi dari target anggaran yang telah direncanakan.
2. Di dalam laporan realisasi anggaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung terlihat jelas sisa anggaran yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

1.3. Rumusan Masalah

Lemahnya perencanaan anggaran akan menimbulkan ketidak efektifnya pelaksanaan anggaran, dan anggaran merupakan alat untuk melaksanakan kegiatan organisasi sehingga harus direncanakan secara matang agar tidak timbul penyimpangan maupun ketidak efektifannya unit kerja pemerintah. Berdasarkan dari

latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Perencanaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan ?
2. Seberapa besar pengaruh Anggaran Modal terhadap Akuntabilitas Keuangan ?
3. Seberapa besar pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kecamatan Cibiru ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh signifikan perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Mengetahui pengaruh signifikan anggaran modal terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3. Mengetahui pengaruh signifikan perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis, dari sisi teoritis penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain :
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat siding sarjana pada jurusan Administrasi Publik.
 - b. Untuk referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan Keuangan
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengalaman kepada penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis, dan pengetahuan tentang pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan.
 - b. Sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi petrencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan sehingga tujuan yang telah direncanakan atau harapan yang ingin dicapai bisa terealisasi dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.6. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ditulis oleh peneliti, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho : b1 = diduga tidak dapat pengaruh perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Ha : b1 = diduga terdapat pengaruh perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan

Ho : b2 = diduga tidak dapat pengaruh anggaran modal terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Ha : b2 = diduga terdapat pengaruh anggaran modal terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Ho : b3 = 0, diduga tidak terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Ha : b3 = 0, diduga terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban alternative atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidak benaran untuk menerima atau menolak jawaban tentative.

Sugiyono (2009:28), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan teori yang peneliti peroleh, belum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai perencanaan anggaran dalam penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas. Namun demikian, masih banyak yang belum melakukan penelitian mengenai perencanaan anggaran dan akuntabilitas di Kecamatan Cibiru ini. Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lusi Novianti pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Bidang Keuangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung”. Pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Lusi Novianti di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung ini terkait mengenai adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Sama halnya dalam penelitian ini melihat berpengaruh atau tidaknya perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lusi Novianti adalah untuk menunjukkan pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan teori yang digunakan oleh Lusi Novianti adalah teori Indra Bastian yang terkait perencanaan anggaran dan teori Mardiasmo yang terkait akuntabilitas, sama halnya dengan penelitian ini menggunakan teori Indra Bastian

yang terkait dengan perencanaan anggaran, sedangkan untuk akuntabilitasnya peneliti menggunakan teori Mahmudi. .

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lusi Novianti, metode penelitian yang digunakan berupa metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, sama halnya dengan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Terakhir untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusi Novianti bahwa hasil penelitian perencanaan anggaran mempunyai pengaruh yang terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 46,7% yang berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. (Sumber: Skripsi Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rudi pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengaruh Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi”. Pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Rudi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi ini terkait mengenai adanya pengaruh perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sama halnya dengan penelitian ini bahwa peneliti melihat adanya pengaruh perencanaan anggaran. Untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rudi adalah untuk menunjukkan adanya pengaruh perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru.

Sedangkan teori yang digunakan oleh Rudi adalah teori Indra Bastian yang terkait dengan Perencanaan Anggaran, dan peneliti pun menggunakan teori yang sama yakni Indra Bastian yang terkait Perencanaan Anggaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudi, metode penelitian yang digunakan berupa metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, sama halnya dengan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudi, bahwa hasil penelitian pengaruh perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 53% dengan sisanya sebesar 47% yang berarti bahwa perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran memiliki peran yang sangat tinggi dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (Sumber: Skripsi program studi Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farida Ulfa pada tahun 2008 dengan judul penelitian “Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto”. Pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Farida Ulfa di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto ini terkait mengenai adanya peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, sama halnya dengan penelitian ini bahwa peneliti melihat adanya pengaruh perencanaan anggaran.

Untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Farida Ulfa untuk menunjukkan bahwa anggaran mempunyai peranan penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan teori yang digunakan oleh Farida Ulfa adalah teori Arif yang terkait dengan anggaran, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Indra Bastian yang terkait perencanaan anggaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida Ulfa menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Untuk hasil penelitian yang dilakukan Farida Ulfa, bahwa hasil penelitian peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bahwa anggaran mempunyai peran yang penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berarti sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengendalikan program pembangunan pemerintah daerah. (Sumber: Skripsi Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Malang (<https://etheses.uin-malang.ac.id>)).

Ke empat, skripsi yang ditulis oleh Laurensius Lusiano Michael pada tahun 2017 dengan judul “Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran Dan Pengendalian Biaya Pemasaran Studi Pada PT. Indolakto”. Pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Lusiano Michael di PT. Indolakto ini terkait mengenai adanya evaluasi proses penyusunan anggaran dan pengendalian biaya pemasaran pada PT. Indolakto, sama halnya dengan penelitian ini bahwa peneliti peneliti

melihat adanya perencanaan anggaran. Untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Lusiano Michael ini untuk menunjukkan bahwa adanya proses penyusunan anggaran dan pengendalian biaya pemasaran pada PT. Indolakto. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini untuk menunjukkan adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru. Sedangkan teori yang digunakan oleh Laurensius Lusiano Michael adalah teori Supriyono yang terkait dengan anggaran, sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan teori Indra Bastian yang terkait dengan perencanaan anggaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Lusiano Michael menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Lusiano Michael sebesar 3,31% dan tidak melebihi batas toleransi perusahaan yakni 5% hal ini menunjukkan bahwa proses langkah-langkah penyusunan anggaran dan biaya pengendalian pada PT. Indolakto terkendali yang disebabkan oleh realisasi anggaran yang lebih besar daripada pertumbuhan penjualan perusahaan. (Sumber: Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Darma Yogyakarta (<https://repository.usd.ac.id>)).

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Zuchairima pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru”. Pokok masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Zuchairima pada PT. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru ini terkait mengenai adanya penyusunan anggaran sebagai alat perencanaan dan

pengendalian biaya proyek pada PT. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru, sama halnya dengan penelitian ini melihat adanya pengaruh perencanaan anggaran. Untuk tujuan penelitian yang dilakukan oleh Zuchairima ini untuk menunjukkan bahwa adanya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya proyek pada PT. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru, halnya dengan penelitian ini peneliti bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Teori yang digunakan oleh Zuchairima menggunakan teori Munandar yang terkait dengan anggaran, sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan teori Indra Bastian yang terkait dengan perencanaan anggaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuchairima ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuchairima yakni anggaran biaya proyek yang telah disusun oleh PT. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru belum lagi sepenuhnya dapat berfungsi sebagai alat perencanaan pengendalian yang efektif. (Sumber: Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (<http://repository.uin-suska.ac.id>)).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Lusi Novianti (2016)	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Bidang Keuangan Badan	Menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh	Meneliti perencanaan anggaran terhadap	Tidak menjadikan Kecamatan

		Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung	secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan	akuntabilitas keuangan	Cibiru sebagai objek penelitian
2	Rudi (2018)	Pengaruh Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi	Menunjukkan perencanaan dan partisipasi anggar berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Meneliti Perencanaan anggaran	Tidak meneliti pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan
3.	Farida Ulfa (2008)	Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Menunjukkan bahwa anggaran mempunyai peranan penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meneliti tentang perencanaan anggaran	Tidak meneliti pengaruh perencanaan anggar terhadap akuntabilitas keuangan
4.	Lurensius Lusiano Michael (2017)	Evaluasi Proses Penyusunan Anggaran dan Pengendalian Biaya Pemasaran	Menunjukkan bahwa adanya proses penyusunan anggaran untuk biaya pengendalian pemasaran	Meneliti tentang anggaran	Tidak meneliti pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan
5.	Zuchairima (2010)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru	Menunjukkan bahwa sudahkah atau belum anggaran ini sebagai alat	Meneliti perencanaan anggaran	Tidak meneliti pengaruh perencanaan anggaran terhadap

			untuk perencanaan dan pengendalian biaya proyek		akuntabilitas keuangan
--	--	--	--	--	---------------------------

Sumber : Diolah oleh peneliti

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perihal Administrasi Publik

Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Silalahi (2005) yang dikutip oleh Akadun bahwa: “Administrasi dalam pengertian sempit diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain” (Akadun, 2009:38).

Sedangkan administrasi diartikan secara luas sebagai suatu kegiatan manusia mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Akadun, 2009:38). Berikut adalah beberapa definisi administrasi dari beberapa ahli (Sahya Anggara, 2012:21) :

1. Menurut Sondang P. Siagian

“Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

2. Menurut The Liang Gie

“Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan”.

3. Menurut Soekarno K

“Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Chander & Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa: “Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan public”. Administrasi public sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah public melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. (Harbani Pasolong, 2013:7)

Menurut Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) mendefinisikan administrasi public adalah (Harbani Pasolong, 2013:7) :

1. Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat

5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi public adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

2.2.2 Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: “Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang”. (Riawan Tjandra, 2009:1).

Menurut Van Der Kemp yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: “Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut”. (Riawan Tjandra, 2009:2).

Menurut Yuswar Zainul Basri keuangan negara adalah: “Semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut”. (Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri, 2013:1).

Begitu juga berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. (Zaiunul Basri & Mulyadi Subri, 2013:3).

2.2.3. Penganggaran

Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun daerah. Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan berbagai produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan system pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Halim (2007:141).

Menurut Mardiasmo (2009:61) mengemukakan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*”.

Menurut Bastian (2010:191) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan, penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penganggaran menurut Mardiasmo (2009:62) adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sector public,

penganggaran merupakan suatu proses politik dan harus diinformasikan kepada public untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam ukuran moneter dan juga merupakan sebagai suatu alat perencanaan untuk waktu atau periode yang akan datang,

2.2.4. Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Nordiawan (2006:50) jenis anggaran sektor publik terbagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran operasional dan anggaran modal

Digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (waktu satu tahun), sedangkan anggaran modal adalah menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

2. Anggaran tentatif dan anggaran enacte.

Anggaran tentative adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislative karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya, sedangkan anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislative

3. Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus

Anggaran dana umum adalah digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan anggaran dana khusus adalah dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu

4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel

Anggaran tetap adalah aprosiasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan, sedangkan anggaran fleksibel adalah harga barang atau jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran keseluruhan akan berfluktuasi berpengaruh pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran eksekutif dan legislatif

Anggaran eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, sedangkan anggaran legislative adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislative tanpa keterlibatan pihak eksekutif.

2.2.5. Fungsi Anggaran

Menurut Nordiawan (2006:48) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama antara lain sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan, politik, koordinasi dan komunikasi, penilai kerja, serta komunikasi.

1) Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakn dibuat.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran organisasi sector public dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3) Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran organisasi sector public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakannya fiscal, apakah melakukan kebijakan fiscal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4) Anggaran sebagai alat politik

Anggaran organisasi sector public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai alat kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai alat komunikasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

2.2.6. Manfaat dan Tujuan Anggaran

Dalam suatu proses kegiatan (aktivitas) yang dilakukan organisasi, anggaran memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh organisasi tersebut dan pemanfaatannya.

Manfaat anggaran menurut Nafrain (2007:19), diantaranya :

- a. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- b. Dapat memotivasi pegawai.
- c. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
- d. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- e. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- f. Alat pendidikan bagi para manajer.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat anggaran, yaitu : sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, sebagai motivasi pegawai, sebagai penanggung jawab tertentu pada karyawan, sebagai control agar tidak terjadi pemborosan, dapat memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin dan sebagai alat pendidikan para manajer. Perencanaan anggaran merupakan salah satu bagian saja dari rencana-rencana perusahaan, karena

perencanaan ini mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik itu pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, anggaran mempunyai tujuan yang secara garis besar untuk mengatur aktivitas yang akan dilakukan perusahaan ditujuan itu, tujuan dari pembuatan anggaran menurut Nafrain (2007:19), yaitu:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran, yaitu: sebagai landasan yuridis formal, pembatasan jumlah dana, mempermudah pengawasan, mencapai hasil yang maksimal, menyempurnakan rencana yang telah disusun, serta menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan mengenai keuangan.

2.2.7. Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir

jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang.

Perencanaan yaitu pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal, 2014:24).

Menurut Abdul (2009:18) bahwa perencanaan memiliki dimensi sebagai berikut:

1. Signifikasi. Tingkat signifikasi tergantung pada tujuan yang diajukan dan signifikasi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun selama proses perencanaan.
2. Fleksibilitas. Perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realitas baik yang berkaitan dengan biaya maupun ppengimplementasiannya.
3. Relevansi. Relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan secara optimal.
4. Kepastian. Kepastian ini diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga.
5. Ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan disusun dalam bentuk yang sederhana serta perlu diperhatikan secara sensitive kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen.

6. Adaptabilitas. Bahwa perencanaan bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel dan adaptabel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.
7. Waktu. Factor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan juga validasi dan reliabilitas yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan dengan masa mendatang.

Anggaran sebagai perencanaan, digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*). Bastian (2010:165).

Menurut Indra Bastian (2010:86), dimensi dari Perencanaan dan Penganggaran Keuangan adalah :

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan ini masih berhubungan dengan proses penilaian investasi. Tujuan dasar dari perencanaan keuangan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi sector public dan juga untuk memenuhi permintaan pelayanan yang ditetapkan pada saat perencanaan awal. Contohnya survey kependudukan, kebutuhan dasar, dan kebutuhan sekunder pendidikan.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal ini berisi rincian dan prakiraan penerimaan dari penjualan aset dan pembayaran pengambil alihan aset baru untuk perencanaan jangka menengah, sedangkan untuk jangka panjang, mempertimbangkan informasi kebutuhan tentang aset yang perlu diganti atau aset yang perlu dibeli.

Dana yang tersedia harus digunakan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (Harun, 2009:113):

- 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indicator kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Menurut Supriyono (2000), hal-hal yang harus dilakukan dalam perencanaan anggaran adalah:

- a. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya tergantung kepada kemampuan mengestimasi. Ketidak tepatan estimasi akan mengakibatkan manfaat perencanaan tidak tercapai.

- b. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. Jika kondisi dan asumsi yang mendasari berubah, maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi.
- c. Perencanaan dan anggaran tidak dapat dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan “pertimbangan” manajemen.

Penganggaran sector public harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Standar Analisis Belanja untuk perencanaan anggaran adalah konsep yang harus diterjemahkan dan disinkronkan dengan keadaan masing-masing daerah untuk mencapai hasil yang efektif. Keadaan daerah satu dengan yang lain (sangat) berbeda, baik ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kondisi wilayahnya. Dalam penerapannya, konsep tersebut diatas, baik yang telah dilaksanakan atau pun yang belum, dapat dilihat dalam tahapan proses perencanaan anggaran. menurut Peter Rooney (2007) indicator perencanaan anggaran adalah:

- a. Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sectoral dan APBD.
- b. Anggaran memihak kelompok miskin.
- c. System pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk.

- d. Anggaran berdasarkan kerangka jangka menengah.
- e. Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis.
- f. Pengendalian pengeluaran digunakan untuk memastikan kinerja anggaran.
- g. Koordinasi dengan PPKD.

Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang penyusunannya sesuai dengan rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran mempunyai dua peran penting didalam sebuah organisasi. Di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan (*planning*) dan di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian (*control*) jangka pendek bagi suatu orgnisasi. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009) fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, maksudnya digunakan sebagai alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan dilakukan untuk:

- a. Perumusan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan.
- b. Perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaan.
- c. Pengalokasian dana berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Penentuan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan anggaran memainkan peranan yang penting dalam mengoperasikan aktivitas suatu organisasi supaya dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya. Adapun manfaat anggaran menurut Hunsesn (2001):

- a. Memberikan tanggung jawab kepada pimpinan atas segala perencanaan, maka penganggaran akan memaksa pimpinan untuk berpikir jauh kedepan.
- b. Memberikan harapan yang pasti, yang merupakan kerangka kerja terbaik untuk bisa menilai prestasi kerja.
- c. Membantu para atasan untuk mengkoordinasikan segala upayanya, agar sasaran secara keseluruhannya berjalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh bagian-bagiannya.

Proses penyusunan perencanaan anggaran harus menggunakan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang diamanatkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 39 (ayat 1-3) adalah pendekatan berdasarkan presentasi kerja. Pendekatan presentasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendapatan dengan keluaran dan hasil, diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

2.2.8. Pengertian Akuntabilitas Keuangan

Mardiasmo dikutip dalam buku Lane (2000:20), secara teoritis, rumusan akuntabilitas dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Mardiasmo, Miriam Budiarjo dan Bergman dan Lane. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks organisasi sector public mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terhadap hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerinth daerah sebagai agen menurut Lane teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi public. Ia menyatakan bahwa Negara deokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal agen.

Dalam konteks sektor publik, Mardiasmo memberikan definisi mengenai akuntabilitas sebagai :

“Mardiasmo (2009:20), “Kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi manat

untuk memnjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical maupun horizontal.

Selain itu Turner dan Hulme dalam buku Penerapan Praktik Good Government (1997:19), “Mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sector public untuk menekan pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertical (otoritas yang lebih tinggi)”.

Mahmudi (2010:23), “Akuntabilitas yaitu sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pemberi mandate (principal).

2.2.9. Bentuk Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:21), bentuk akuntabilitas publik terbagi atas beberapa bagian, untuk dapat memahaminya penulis telah menyertakan beberapa pendapat mengenai bagian-bagian dari akuntabilitas. Mardiasmo telah membagi akuntabilitas publik kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
- 2) Akuntabiitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Dari kedua macam akuntabilitas yang telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:21), dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertanggung jawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Menurut Rosjidi (2001:94), akuntabilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal
- 2) Akuntabilitas Eksternal

Rosjidi (2001:145), Penjelasan mengenai akuntabilitas internal dan eksternal diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus public baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatan secara periodic maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
- 2) Akuntabilitas eksternal melekat pada setiap Lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan

semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun dikounikasikan kepda pihak eksternal lingkungan.

2.2.10. Dimensi dan Indikator Akuntabilitas

Menurut Mahmudi, 2011 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga public yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probability and legality). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas proses/manajerial. Akuntabilitas proses adalah pertanggung jawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga public tas kebijakan-kebijakan yang diambil.
5. Akuntabilitas keuangan/finansial. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban lebaga-lembaga public untuk menggunakan uang public secara ekonomi, efisien dan efektf, tidak ada

pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan public menjadi perhatian utama masyarakat.

2.2.11. Akuntabilitas Keuangan

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui oleh rakyat, jika pemerintah tidak memberi tahu kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan dana masyarakat beserta penggunaannya. Mahmudi (2011) mengemukakan salah satu akuntabilitas public adalah akuntabilitas keuangan, dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

LAN RI dan BPKP (2001:29), menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan. Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Manfaat. Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan

meperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya beberapa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

3. Akuntabilitas Prosedural. Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas procedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses.

Miriam Budiardjo (2008:45), mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandate untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandate itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balance system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (Presiden, Wakil Presiden dan kabinetnya), yudikatif (MA serta sistem peradilan) serta legislative (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat. Guy Peter menyebutkan adanya tiga tipe akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Administratif
3. Akuntabilitas Kebijakan Publik

Paparan ini bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indicator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan public maupun administrasi public. Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Pengambilan keputusan dalam organisasi-organisasi public melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*consistueny*) para pemimpin politik, teknokrat atau administrator, serta para pelaksana dilapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk membuat kebijakan maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas public menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya public dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

2.2.12. Hubungan Perencanaan Anggaran dengan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dipandang perlu dalam sebuah perusahaan, organisasi, non profit baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Perencanaan juga perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori hubungan yakni Teori Agensi. Konsep teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan antara *principal* dan *agent*. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas kepentingan *principal*, termasuk otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban public yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan, dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam mengelola anggaran. Sejak dua belas bulan belum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan.

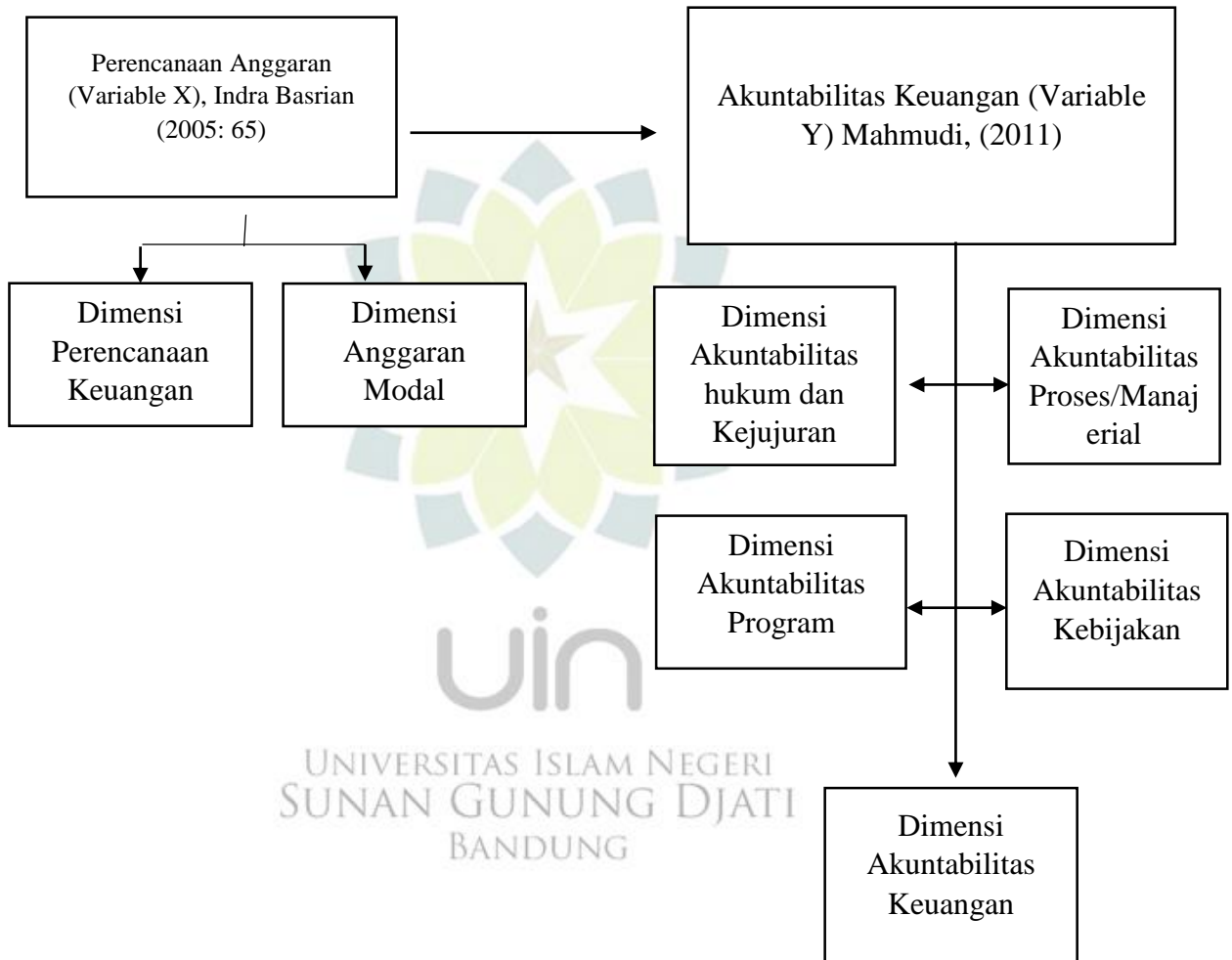
Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menyebabkan kegagalan pada perencanaan yang telah disusun. Mengingat perencanaan dalam menyusun anggaran sangat penting, karena program yang terus menerus dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang matang dan detail akan mengindikasikan kinerja pelaksanaan yang kurang efektif.

Setelah tahap penganggaran terdapat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan adalah merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan public menjadi perhatian utama masyarakat.

Penjelasan kerangka pemikiran di atas, bisa dilihat lebih jauh dari gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar di atas bahwa fokus penelitian ini yaitu pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2017. Dengan melihat beberapa dimensi perencanaan anggaran yaitu perencanaan keuangan dan anggaran modal, serta dimensi akuntabilitas keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini untuk melihat hubungan antar variabel atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif.

Sedangkan pendekatan kuantitatif dipilih karena peneliti menggunakan dua variabel dalam proses penelitian, yaitu pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dan pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian yang bersifat kuantitatif, yakni berupa angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan terdiri dari variabel bebas (Perencanaan Anggaran) dan variabel terikat (Akuntabilitas Keuangan), dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah nilai-nilai variabel yang ada dalam Perencanaan Anggaran dapat merubah nilai yang ada pada variabel Akuntabilitas Keuangan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan terhadap masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data hasil serangkaian observasi atau pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka . (Silalahi, 2012:282). Dan data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kuantitatif.
- b. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner/angket kepada pegawai Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- c. Peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang pegawai, karena jumlah sampel kurang dari 100 maka di jadikan sampel 30 orang yang ada di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- d. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling atau sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel.

Untuk keperluan analisis data, maka peneliti memberikan data pendukung yang berasal dari dalam dan luar instansi. Karena itu peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi actual ketika peristiwa terjadi. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari instansi atau lembaga yang diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket/kuesioner sebagai data primer.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia

sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2017 sebagai data sekunder.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun dan mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik pengamatan secara langsung. Pada bulan November Peneliti mengunjungi atau mengadakan pengamatan secara langsung di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
- b. Studi Literatur Kepustakaan
Studi literature kepustakaan yaitu data dengan cara mempelajari literature, buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan anggaran dan akuntabilitas keuangan yang merupakan penunjang teori atau data yang relevan. Dan data tersebut diperoleh dari Kecamatan Cibiru Kota Bandung berupa LAKIP Kecamatan Cibiru Tahun 2015-2017.
- c. Angket (Kuesioner), menurut Sugiyono kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya. Kuesioner akan ditujukan kepada 30 responden yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kecamatan Cibiru serta Kelurahan yang berada di sekitar Kecamatan Cibiru dengan 35 pernyataan.

Menurut Silalahi, Ulber (2013:280) teknik pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.

3.4. Teknik Pengolahan Data

3.4.1. Pengukuran Data

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert,. Menurut Sugiyono (2013:107) Skala Likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dalam penelitian, fenomena social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang sebelumnya sebagai variabel penelitian. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden.

Menurut Uber Silalahi (2012:229) Skala Likert sebagai teknik penskalaan banyak digunakan terutama untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang tentang dirinya atau kelompoknya orang yang berhubungan suatu hal. Skala ini sering disebut sebagai summated acale yang berisi sejumlah

pertanyaan dengan kategori respon. Pertama-tama, ditentukan beberapa alternative kategori respon atau seri item respon yang mengekspresikan luas jangkauan sikap dari ekterm positif ke ekterm negative untuk direspon oleh responden. Adapun skor tertinggi untuk setiap jawaban adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Setiap pertanyaan atau pernyataan dalam angket dibagi dalam 5 alternatif jawaban yang disusun bertingkat dengan pembenaan bobot nilai (skor) sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pedoman Pemberian Bobot Nilai pada Skala Likert

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai Positif
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Sugiyono, 2013:108)

Dalam penjelasan skor jawaban responden, dilakukan pengkategorian skor total untuk masing-masing indicator. Untuk mengkategorikan data yang diperoleh dari perhitungan angket, digunakan pentabulsian dat adari Redi Pnuju yaitu sebagai berikut:

Untuk menyebutkan kategori tinggi, sedang dan rendah, terlebih dahulu harus menentukan nilai indeks minimum, maksimum dan intervalnya serta jarak intervalnya sebagai berikut :

1. Nilai indeks minimum adalah skor minimum dikali jumlah pertanyaan dikali jumalh responden
2. Nilai indeks maksimum adalah skor tertinggi dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah respnden

3. Interval adalah selisih antara nilai indeks maksimum dengan nilai indeks minimum
4. Jarak interval adalah interval ini dibagi jumlah jenjang yang digunakan
 - a. Nilai indeks minimum = skor minimum x jumlah soal x jumlah responden
 - b. Nilai indeks maksimum = skor maksimum x jumlah soal x jumlah responden
 - c. Interval = nilai indeks maksimum – nilai indeks minimum
 - d. Jarak Interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang (5)}}$

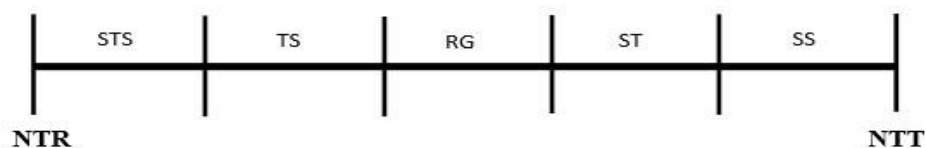
Hal ini secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Garis Kontinum

Skor Minimum

Skor

Maksimum



Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

RG = Ragu-ragu

ST = Setuju

SS = Sangat Setuju

NTR = Nilai Terendah

NTT = Nilai Tertinggi

3.4.2. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan termasuk pengujiannya. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh masalah penelitian yang sekaligus mencerminkan karakteristik tujuan studi apa yang akan dieksplorasi, dideskripsikan atau menguji hipotesis (Anwar, 2013:115).

3.4.2.1. Uji Validitas

Menurut Ulber Silalahi (2015:472) validitas menunjuk pada sejauh mana ukuran secara akurat merefleksikan pokok isi konstruk yang diukur. Jika ukuran mewakili konstruk maka instrument ukuran penelitian adalah valid atau sah. Validitas berhubungan dengan dua hal yaitu ketelitian dan kecermatan serta ketepatan. Suatu instrument pengukur dikatakan teliti atau cermat jika memiliki kemampuan menunjukkan secara cermat dan teliti ukuran besar atau kecilnya gejala yang ingin diukur.

Dengan menggunakan program SPSS, statistik uji yang digunakan oleh peneliti untuk uji validitas adalah korelasi *pearson product moment correlation*. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item

pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diukur.

Adapun rumus Uji Validitas yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy}	= Koefisien korelasi suatu butir/item
n	= Jumlah responden pretest
X	= Skor pernyataan
Y	= Skor total seluruh pernyataan
XY	= Skor pernyataan dikalikan skor total

Setelah didapat nilai korelasi dengan rumus diatas maka untuk mengetahui nilai validitas nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel. Setelah semua korelasi setiap pernyataan dengan skor total diperoleh, nilai-nilai tersebut dapat dibandingkan dengan nilai kritis. Dengan menggunakan program SPSS versi 20.0, peneliti menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika r hitung $\geq r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika r hitung $< r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Setelah diketahui besarnya koefisien korelasi, kemudian dengan uji keberartian koefisien r dengan uji t (taraf signifikansi 5%), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} : df - 2$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

r : Koefisien korelasi pearson

df : *Degree of freedom* = n-2

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka no pernyataan tersebut valid.

Adapun cara untuk mengukur validitas menggunakan SPSS 20.0, atau hasil *output* SPSS akan menandai signifikansi dari setiap item pernyataan apakah valid atau tidak bila signifikansinya tidak lebih dari 0,05.

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Ulber silalahi (2012: 236) Reliabilitas merupakan keandalan atau ketepatan akurasi dari instrument penelitian dalam suatu ukuran. Reliabilitas instrument harus diuji untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya keakurasiannya dan konsistensinya. Semakin tinggi reliabilitas menunjukkan kesalahan pengukuran semakin kecil dan begitupun sebaliknya, makin besar kesalahan pengukuran, semakin menunjukkan ketidak andalan alat ukur tersebut. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi dari instrument dalam mengungkapkan fenomena dari sekelompok individu meskipun dari dalam waktu yang berbeda. Menurut Ulber Silalahi (2015: 471) jika hasil uji reliabilitas menunjukkan $\alpha > 0,6$ maka instrument ukuran tersebut mengindikasikan *satisfactory internal consistency reliability* sehingga layak digunakan sebagai instrument ukuran dalam penelitian. Tetapi jika $< 0,6$ maka instrument ukuran

tersebut mengindikasikan *unsatisfactory internal consistency reliability* sehingga tidak layak digunakan sebagai instrument ukuran untuk penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* untuk mengukur reabilitas instrument penelitian. Menurut Ulber silalahi (2015: 470) untuk mengukur reabilitas dengan formula *Cronbach Alpha* dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS. *Cronbach Alpha* dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{K}{K - 1} \right) \left(\frac{s_r^2 - \sum s_i^2}{s_x^2} \right)$$

Keterangan :

α = Koefisien reabilitas *Cronbach's Alpha*

K = Jumlah item pertanyaan

$\sum s_i^2$ = Jumlah varians skor item

s_x^2 = Varian skor uji seluruh item K

Apabila telah didapat nilai α maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Jika $\alpha > 0,6$ maka variabel tersebut reliabel.

Jika $\alpha < 0,6$ maka variabel tersebut tidak reliabel.

3.5. Uji Hipotesis

3.5.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Ulber Silalahi (2012:426) “Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independen dan satu variabel dependen atau membuat prediksi dengan menggunakan satu variabel independen tunggal”. Analisis regresi linier sederhana adalah salah satu alat analisis yang

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan regresi linier sederhana yaitu, sebagai berikut :

$$Y' = a + b X$$

Keterangan :

Y' = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dampak dari penggunaan analisis regresi sederhana, untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen atau untuk meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen dan sebaliknya.

3.5.2. Uji Parsial (Uji T)

Uji T yaitu untuk apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 = b_1 = 0$ artinya variabel independent (X_1, X_2, X_3, X_4) secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent (Y)
- $H_a = b_1 \neq 0$ artinya variabel independent (X_1, X_2, X_3, X_4) secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent (Y).

Uji T dilakukan dengan menggunakan rumus, Ulber Silalahi (2015: 478) sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan :

t = Uji T

r = Koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi diketahui tingkat signifikan atau tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t hitung) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. Tingkat signifikansinya yaitu 5% ($\alpha=0,05$), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95% maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95%. Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Ha diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

3.5.3. Analisis Koefisien Determinasi

Ulber Silalahi (2012:376) koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). Analisis determinasi adalah untuk menunjukkan seberapa pengaruh tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X koefisien ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD : koefisien determinasi

r : nilai kuadrat koefisien korelasi

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien determinasi menurut Sugiyono adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi

$0\% \leq KD \leq 100\%$	Tingkat Hubungan
81% – 100%	Sangat tinggi
49% – 80%	Tinggi
17% – 48%	Cukup Tinggi
5% – 16%	Rendah tapi pasti
0% – 4%	Rendah atau lemah sekali

Sumber : Sugiyono (2011:183)

Dengan melihat tabel Model Summary pada kolom *R square*. Lalu dicocokkan pada tabel koefisien Determinasi.

3.6. Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang memiliki berbagai macam nilai. Sugiyono (2013:39), menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel dalam penelitian harus didefinisikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti dan ditarik kesimpulannya, yaitu:

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
- b. Variabel Terikat . Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini Variabel bebasnya (variabel x) adalah Perencanaan Anggaran sedangkan variabel terikatnya (variabel y) adalah Akuntabilitas Keuangan.

Operasionalisasi variabel adalah penentu konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Konstruk adalah suatu bayangan atau pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian dan atau untuk tujuan teori.

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Dmensi	Indikator
Perencanaan Anggaran (Varibel X) Indra Bastian (2005:65)	1. Perencanaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaan 3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun 4. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
	2. Anggaran Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan rencana jangka panjang 2. Pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, peabot dan sebagainya
Akuntabilitas Keuangan (Variabel Y) Mahmudi, (2011)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati hukum yang berlaku
	2. Akuntabilitas proses/manajerial	Akuntabilitas proses/manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif
	3. Akuntabilitas program	Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
	4. Akuntabilitas kebijakan	Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga public atas kebijakan-kebijakan yang diambil
	5. Akuntabilitas keuangan	Akuntabilitas keuanan adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang public secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.7. Jadwal Penelitian

3.7.1. Jadwal penelitian

Waktu Penyusunan proposal penelitian ini dimulai dari bulan Desember hingga selesai. Adapun rincian mengenai jadwal penelitian dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No. (1)	KEGIATAN (2)	NOV (3)	DES (4)	JAN (5)	FEB (6)	MARET-JUNI (7)	JULI (8)	AGT (9)
1.	Melakukan observasi data dan pencarian data-data	■						
2.	Studi Literatur	■						
3.	Penentuan Judul	■						
4.	Seminar Rancangan Usulan Penelitian	■						
5.	Penyusunan Usulan Penelitian	■	■					
6.	Sidang Usulan Penelitian			■				
7.	Penelitian				■	■	■	
8.	Bimbingan Skripsi				■	■	■	
9.	Penyelesaian Skripsi				■	■	■	
10.	Sidang Skripsi							■

3.7.2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang beralamat di Jalan Manisi Kelurahan Pasirbiru Kota Bandung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu dari tiga puluh kecamatan yang berada di wilayah administrasi Kota Bandung. Secara astronomis Kecamatan Cibiru terletak di antara 6,89° LS (Lintang Selatan) – 6,93° LS (Lintang Selatan) dan antara 107,70° BT (Bujur Timur) – 107,70° BT (Bujur Timur) dimana menjadikannya sebagai Kecamatan paling Timur Kota Bandung (Sumber: cibiru.bandung.go.id).

Kecamatan Cibiru memiliki luas wilayah seluas 652,92 hektar. Secara topografi berada ± 760 meter di atas permukaan laut, wilayah Cibiru secara umum berbukit dan memiliki kemiringan daratan, dengan titik tertinggi di bagian utara dan terendah di bagian selatan.

Secara geografis, Kecamatan Cibiru berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung (Bagian Utara), Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung (Bagian Selatan), Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Bagian Timur), Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung (Bagian Barat). Dan Kecamatan Cibiru ini beralamatkan di Jalan Manisi No.13, Pasir Biru, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Secara demografis, Kecamatan Cibiru meliputi luas wilayah 652,930 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 61.683 jiwa dan 17.627 Kepala Keluarga (KK).

Untuk kepentingan administrasi kependudukan empat Kelurahan tersebut terdiri dari 53 Rukun Warga, dan 283 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cibiru terdiri dari pemukiman. Sedangkan kegiatannya didominasi oleh jasa perdagangan (Sumber: cibiru.bandung.go.id)

4.1.2. Sejarah Singkat Kecamatan Cibiru

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Cibiru pertama kali ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Sumber: cibiru.bandung.go.id).

Dan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ditetapkan juga kelurahan di masing-masing kecamatan se-Kota Bandung. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Cibiru terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Palasari, Kelurahan Cipadung, Kelurahan Pasir Biru, dan Kelurahan Cisarupan.

4.1.3. Profil Responden

Peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada 30 responden yang dimana terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

ada di Kecamatan Cibiru maupun Kelurahan yang berada di sekitar Kecamatan Cibiru.

Pertama, Emay Susmayawati yang berjenis kelamin perempuan, berumur 58 tahun serta pendidikan terakhirnya yaitu S2 dan beliau sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cibiru. Kedua, Reti Supraba yang berjenis kelamin perempuan, berumur 37 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Staff di Kecamatan Cibiru. Ketiga, Leni Lusianawati yang berjenis kelamin perempuan, berumur 26 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan dia saat ini sebagai Pelaksana di Kecamatan Cibiru. Ke empat, Yuni Melia yang berjenis kelamin perempuan, berumur 37 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Pelaksana di Kecamatan Cibiru. Kelima, Devi yang berjenis kelamin perempuan, berumur 40 tahun serta pendidikan terakhirnya S2 dan beliau sebagai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Cibiru. Ke enam, Deden Suganda yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 55 tahun serta pendidikan terakhirnya SLTA dan beliau sebagai Fungsional Umum di Kecamatan Cibiru.

Ketujuh, Hartaa yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 48 tahun dan beliau sebagai Staff di Kecamatan Cibiru. Kedelapan, Rahmat yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 53 tahun serta pendidikan terakhirnya SMA dan beliau sebagai Pelaksana di Kecamatan Cibiru. Kesembilan, Misbahudin yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 50 tahun serta pendidikan terakhirnya S2 dan beliau sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Cibiru. Kesepuluh, Jajat Supriatna yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 57 tahun serta pendidikan terakhirnya SLTP dan beliau sebagai Pengadministrasian Pelayanan Khusus di

Kecamatan Cibiru. Kesebelas, Endut Sutisna yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 54 tahun serta pendidikan terakhirnya SMA dan beliau sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan. Kedua belas, Taryadi S.E yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 50 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Pelaksana Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan. Ketiga belas, Danny Swastikawati S.ST yang berjenis kelamin perempuan, berumur 49 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan.

Keempat belas, Rizki Lingga, yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 30 tahun serta pendidikan terakhirnya S2 dan beliau sebagai Staff Ekonomi Pembangunan. Kelima belas, Andri Rhmantano yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 23 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan dia sebagai Staff Ekonomi Pembangunan. Ke enam belas, Entin Kartini yang berjenis kelamin perempuan, berumur 51 tahun serta pendidikan terakhirnya SMA dan beliau sebagai Staff Ekonomi Pembangunan. Ketujuh belas, Sugiartini yang berjenis kelamin perempuan, yang berumur 47 tahun serta pendidikan terakhirnya yaitu S1 dan beliau sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kedelapan belas, Asep Sutiawan yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 57 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Bendahara Pengeluaran. Kesembilan belas, Hanisah Harun Al Rasjid yang berjenis kelamin perempuan, berumur 56 tahun serta pendidikan terakhirnya SLTA dan beliau sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Kedua puluh, Drs. Heri Akhmad Zakaria, M.Si yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 52 tahun serta pendidikan terakhirnya S2 dan beliau sebagai Kepala

Seksie Pemerintahan. Kedua puluh satu, Jamiludin yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 56 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Sekretaris Lurah. Kedua puluh dua, Aam Rosamah yang berjenis kelamin perempuan, berumur 47 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Sekretaris Lurah. Kedua puluh tiga, Tochidi yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 56 tahun serta pendidikan terakhirnya S2 dan beliau sebagai Sekretaris Lurah. Kedua puluh empat, Lukman Ependi S.Pd yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 50 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Lurah. Kedua puluh lima, Sulbeni S.AP, M.Si yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 45 tahun serta pendidikan terakhirnya S2 dan beliau sebagai Kepala Seksie Pemerintahan. Kedua puluh enam, R.Iwan yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 57 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Kepala Seksie Kesejahteraan Sosial Pasir Biru.

Kedua puluh tujuh, Asep Sudrajat yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 56 tahun serta pendidikan terakhirnya SMA dan beliau sebagai Staff Kepala Seksie Pemerintahan. Kedua puluh delapan, Asep Darmawan S.Sos yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 57 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Kedua puluh Sembilan, Acep Jamaludin yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 47 tahun serta pendidikan terakhirnya SMA dan beliau sebagai Staff. Ketiga puluh, Maulana yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 29 tahun serta pendidikan terakhirnya S1 dan beliau sebagai Staff.

4.1.4. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang disusun oleh Kecamatan Cibiru terkait dengan program atau kegiatan ternyata masih memerlukan perbaikan baik itu perencanaan keuangannya maupun anggaran modalnya. Perencanaan ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap programnya.

Program maupun kegiatan yang dilaksanakan masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Jika terdapat sisa anggaran dalam program atau kegiatan instansi dibawah naungan pemerintah maka program atau kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak termasuk kedalam nilai yang maksimal yakni 100%.

Perencanaan keuangan dan anggaran modal merupakan dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, dengan dimensi tersebut peneliti menyusun kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan anggaran dari subjek penelitian ini, yang terdiri dari 35 pernyataan yang kemudian disebarakan kepada 30 orang responden. Adapun hasil tanggapan responden tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.4.1. Perencanaan Keuangan

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari dimensi perencanaan keuangan. Dalam penelitian ini skor untuk dimensi diperoleh dari hasil jawaban responden. Dimensi perencanaan keuangan ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan

ke dalam 8 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi perencanaan keuangan tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Keuangan (n=30)

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
1	12	16	2	0	0	130
2	16	14	0	0	0	136
3	16	13	1	0	0	133
4	13	16	1	0	0	132
5	11	18	1	0	0	130
6	8	21	1	0	0	127
7	10	20	0	0	0	130
8	12	18	0	0	0	132
Total	98	136	6	0	0	1050

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum interval yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), Sangat Tinggi (ST), untuk delapan item pernyataan yang termasuk dimensi perencanaan keuangan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks minimum} &= \text{Skor minimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 8 \times 30 \\
 &= 240
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks maksimum} &= \text{Skor maksimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 8 \times 30 \\
 &= 1200
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum} \\ &= 1200 - 240 \\ &= 960 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}} \\ &= \frac{960}{5} \\ &= 192 \end{aligned}$$

Gambar 4.1

Garis Kontinum Mengenai Perencanaan Keuangan



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran perencanaan keuangan memperoleh nilai sebesar 960 yang terletak antara rentang 816 dan 1008 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.4.2. Anggaran Modal

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai perencanaan anggaran dalam akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari anggaran modal. Dalam penelitian ini skor untuk dimensi anggaran modal diperoleh dari hasil tanggapan responden.

Dimensi anggaran modal ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan kedalam 3 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi anggaran modal tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Tanggapan Responden Mengenai Anggaran Modal (n=30)

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
9	6	8	6	7	3	97
10	9	6	8	5	2	105
11	8	14	6	1	1	117
Total	23	28	20	13	6	319

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

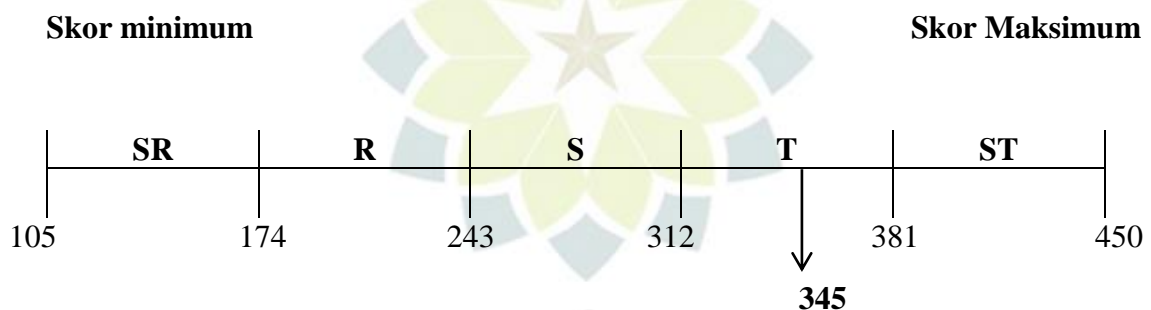
$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks minimum} &= \text{Skor minimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 3 \times 35 \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks maksimum} &= \text{Skor maksimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 3 \times 30 \\
 &= 450
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum} \\
 &= 450 - 105 \\
 &= 345
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jarak Interval} &= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}} \\
 &= \frac{345}{5} \\
 &= 69
 \end{aligned}$$

Gambar 4.2
Garis Kontinum Mengenai Anggaran Modal



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran perencanaan keuangan memperoleh nilai sebesar 342 yang terletak di antara rentang 312 dan 381 dengan berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.4.3. Perencanaan Anggaran

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perencanaan anggaran dalam akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari perencanaan anggaran, dalam penelitian ini skor diperoleh dari hasil tanggapan responden. Perencanaan anggaran ini berisi lima indikator dan dioperasionalkan ke dalam 5 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Taggapan responden teraji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Anggaran (n=30)

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
12	13	14	3	0	0	130
13	12	14	4	0	0	128
14	5	13	11	1	0	101
15	8	13	7	1	1	116
16	9	12	7	1	1	117
Total	47	66	32	3	2	592

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks minimum} &= \text{Skor minimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 5 \times 30 \\
 &= 150
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks maksimum} &= \text{Skor maksimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 5 \times 35 \\
 &= 875
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum} \\
 &= 875 - 150 \\
 &= 725
 \end{aligned}$$

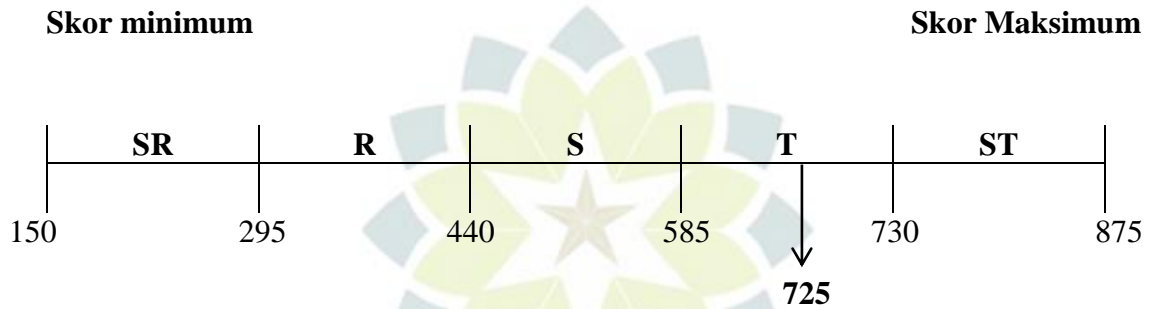
$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}}$$

$$= \frac{725}{5}$$

$$= 145$$

Gambar 4.3

Garis Kontinum Mengenai Perencanaan Anggaran



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran perencanaan anggaran memperoleh nilai sebesar 725 yang terletak antara rentang 585 dan 730 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.4.4. Akumulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Perencanaan Anggaran

Adapun setelah mengetahui skor dari perencanaan keuangan, anggaran modal dan perencanaan anggaran, skor dari setiap indikator diakumulasikan untuk mengetahui skor keseluruhan dari tanggapan responden yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Akumulasi Jawaban Responden Mengenai Perencanaan Anggaran

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
1	12	16	2	0	0	130
2	16	14	0	0	0	136
3	16	13	1	0	0	135

4	13	16	1	0	0	132
5	11	18	1	0	0	130
6	8	21	1	0	0	127
7	10	20	0	0	0	130
8	12	18	0	0	0	132
9	6	8	6	7	3	97
10	9	6	8	5	2	105
11	8	14	6	1	1	117
12	13	14	3	0	0	130
13	12	14	4	0	0	128
14	5	13	11	1	0	112
15	8	13	7	1	1	116
16	9	12	7	1	1	117
Total	168	230	58	16	8	1974
Skor Ideal		30 x 16 x 5			2400	
% Total Skor		1974/2400x100			82,25	

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan jawaban responden dengan rata-rata sebesar 82,25%.

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

Nilai indeks minimum = Skor minimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 1 \times 16 \times 30$$

$$= 480$$

Nilai indeks maksimum = Skor maksimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 5 \times 16 \times 30$$

$$= 2400$$

Interval = Nilai indeks maksimum – nilai indeks minimum

$$= 2400 - 480$$

$$= 1920$$

$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}}$$

$$= \frac{1920}{5}$$

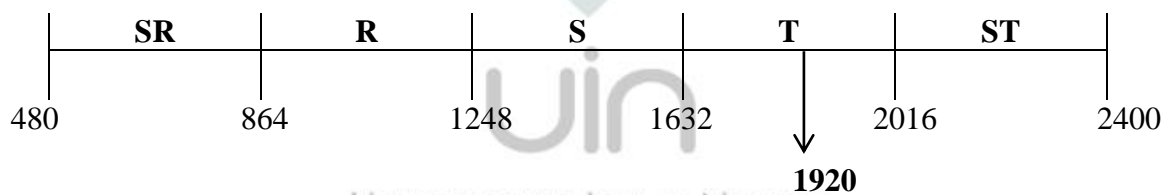
$$= 384$$

Gambar 4.4

Garis Kontinum Mengenai Akumulasi Variabel Perencanaan Anggaran

Skor minimum

Skor Maksimum



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran perencanaan keuangan memperoleh nilai sebesar 1920 yang terletak antara rentang 1632 dan 2016 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori tinggi

Dengan demikian berdasarkan hasil angket yang di sebar oleh peneliti di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran memiliki tingkat yang **tinggi**.

4.1.5. Akuntabilitas Keuangan

Didalam akuntabilitas keuangan mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial

organisasi kepada pihak luar. Namun di Kecamatan Cibiru ini, laporan yang disajikan masih banyak hal yang harus diperbaiki baik itu akuntabilitas hukum dan kejujurannya, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan yang paling substansialnya yakni akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas yang disebutkan di atas merupakan dimensi yang digunakan dalam penelitian ini, dengan dimensi tersebut peneliti menyusun kuesioner yang terdiri dari 35 pernyataan yang kemudian disebarakan kepada 30 orang responden. Adapun hasil tanggapan responden tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.5.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Dalam penelitian ini skor untuk dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran diperoleh dari hasil tanggapan responden. Dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan kedalam 3 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap akuntabilitas hukum dan kejujuran ini tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
17	7	10	6	5	2	105
18	7	9	10	3	1	108
19	9	14	7	0	0	122
Total	23	33	23	8	3	335

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

Nilai indeks minimum = Skor minimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 1 \times 3 \times 30$$

$$= 90$$

Nilai indeks maksimum = Skor maksimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 5 \times 3 \times 30$$

$$= 450$$

Interval

= Nilai indeks maksimum – nilai indeks minimum

$$= 450 - 90$$

$$= 360$$

Jarak Interval

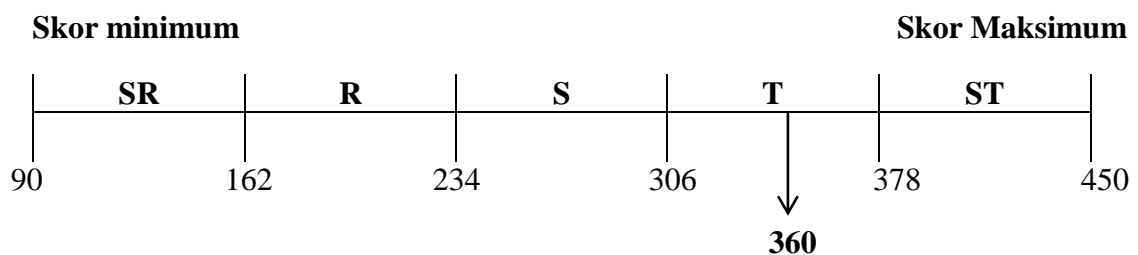
$$= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}}$$

$$= \frac{360}{5}$$

$$= 72$$

Gambar 4.5

Garis Kontinum Mengenai Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran memperoleh nilai sebesar 360 yang terletak antara rentang 306 dan 378 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.5.2. Akuntabilitas Proses/Manajerial

Dalam penelitian ini skor untuk akuntabilitas proses/manajerial diperoleh dari hasil tanggapan responden. Akuntabilitas proses/manajerial ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan ke dalam 3 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap akuntabilitas proses/manajerial ini tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Proses/Manajerial

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
20	17	6	5	1	1	127
21	17	5	3	3	2	122
22	10	7	8	4	1	111
Total	44	18	16	8	4	360

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

Nilai indeks minimum = Skor minimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 1 \times 3 \times 30$$

$$= 90$$

Nilai indeks maksimum = Skor maksimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 5 \times 3 \times 30$$

$$= 450$$

Interval = Nilai indeks maksimum – nilai indeks minimum

$$= 450 - 90$$

$$= 360$$

Jarak Interval = $\frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}}$

$$= \frac{360}{5}$$

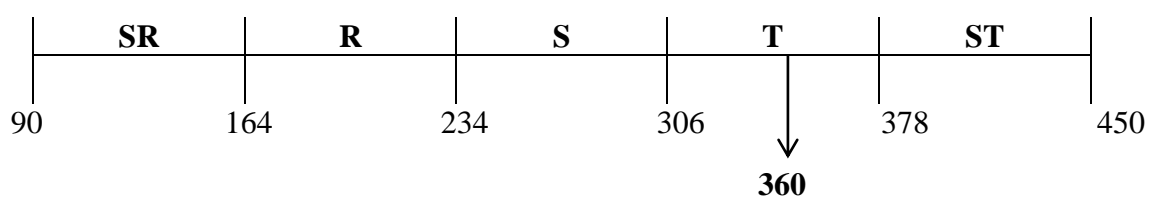
$$= 72$$

Gambar 4.6

Garis Kontinum Mengenai Akuntabilitas Proses/Manajerial

Skor minimum

Skor Maksimum



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran memperoleh nilai sebesar 360 yang terletak antara rentang 306 dan 378 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.5.3. Akuntabilitas Program

Dalam penelitian ini skor untuk akuntabilitas program diperoleh dari hasil tanggapan responden. Akuntabilitas program ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan ke dalam 3 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap akuntabilitas proses/manajerial ini tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Program

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
23	5	14	7	2	2	108
24	9	11	6	3	1	114
25	8	11	7	4	0	113
Total	22	36	20	9	3	335

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

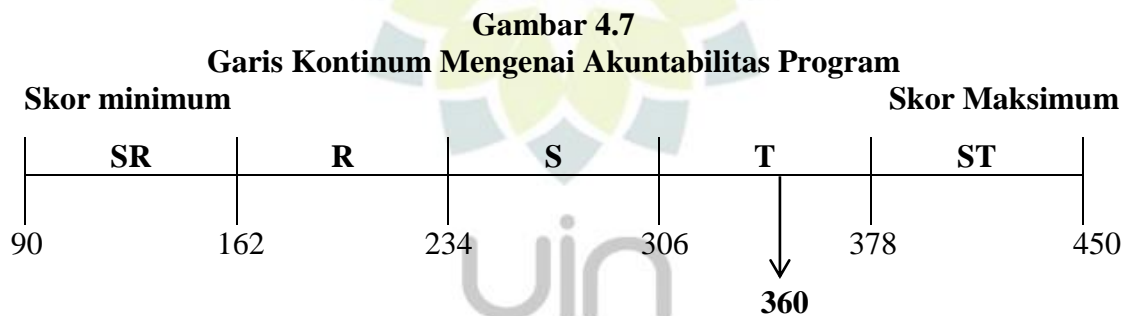
Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai indeks minimum} &= \text{Skor minimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 3 \times 30 \\ &= 90\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai indeks maksimum} &= \text{Skor maksimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 3 \times 30 \\ &= 450\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum} \\ &= 450 - 90 \\ &= 360 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}} \\ &= \frac{360}{5} \\ &= 72 \end{aligned}$$



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran memperoleh nilai sebesar 360 yang berada pada rentang 306 dan 378 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.5.4. Akuntabilitas Kebijakan

Dalam penelitian ini skor untuk akuntabilitas proses/manajerial diperoleh dari hasil tanggapan responden. Akuntabilitas proses/manajerial ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan ke dalam 3 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap akuntabilitas proses/manajerial ini tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kebijakan

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
26	8	15	5	1	1	118
27	10	10	7	2	1	116
28	10	13	5	1	1	120
29	4	15	8	1	2	108
Total	32	53	25	5	5	462

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks minimum} &= \text{Skor minimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 4 \times 30 \\
 &= 120
 \end{aligned}$$

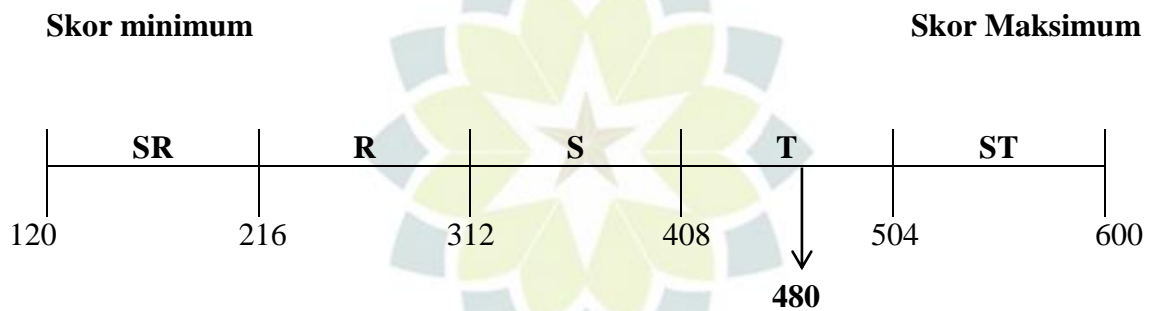
$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks maksimum} &= \text{Skor maksimum} \times \text{jumlah pernyataan} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 4 \times 30 \\
 &= 600
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum} \\
 &= 600 - 120 \\
 &= 480
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jarak Interval} &= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}} \\
 &= \frac{480}{5} \\
 &= 96
 \end{aligned}$$

Gambar 4.8

Garis Kontinum Mengenai Akuntabilitas Kebijakan



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran memperoleh nilai sebesar 480 yang terletak antara rentang 408 dan 504 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.5.5. Akuntabilitas Keuangan/Finansial

Dalam penelitian ini skor untuk akuntabilitas keuangan/finansial diperoleh dari hasil tanggapan responden. Akuntabilitas keuangan/finansial ini berisikan lima indikator dan dioperasionalkan ke dalam 3 item pernyataan dengan jawaban 30 responden. Tanggapan responden terhadap akuntabilitas proses/manajerial ini tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Keuangan/Finansial

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
30	10	13	6	0	1	121

31	12	12	5	0	1	124
32	13	13	3	0	1	133
33	12	12	5	0	1	124
34	7	11	9	2	1	111
35	10	12	2	3	2	112
Total	64	73	30	5	7	614

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

Nilai indeks minimum = Skor minimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 1 \times 6 \times 30$$

$$= 180$$

Nilai indeks maksimum = Skor maksimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 5 \times 6 \times 30$$

$$= 900$$

Interval = Nilai indeks maksimum – nilai indeks minimum

$$= 900 - 180$$

$$= 720$$

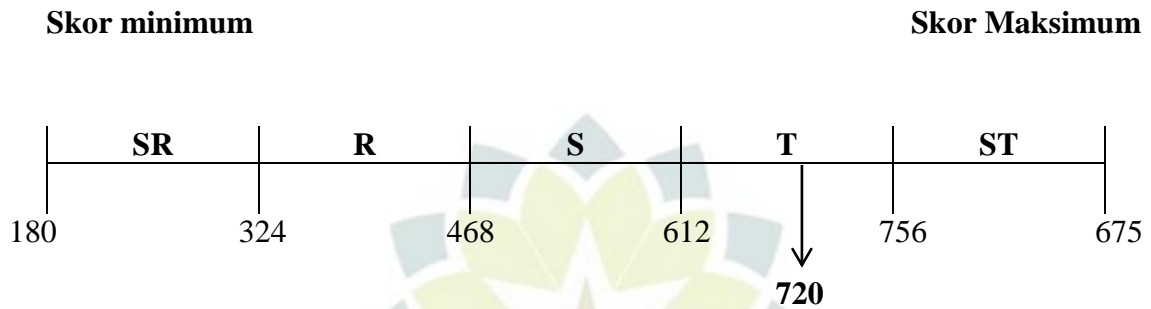
Jarak Interval =
$$\frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}}$$

$$= \frac{720}{5}$$

= 144

Gambar 4.9

Garis Kontinum Mengenai Akuntabilitas Keuangan/Finansial



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran akuntabilitas hukum dan kejujuran memperoleh nilai sebesar 720 yang terletak pada rentan 612 dan 756 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

4.1.5.6. Akumulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Akuntabilitas

Keuangan

Adapun setelah mengetahui skor dari perencanaan keuangan, anggaran modal dan perencanaan anggaran, skor dari setiap indicator diakumulasikan untuk mengetahui skor keseluruhan dari tanggapan responden yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10

Akumulasi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Keuangan

No	Item Alternatif Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
17	7	10	6	5	2	105
18	7	9	10	3	1	108
19	9	14	7	0	0	122
20	17	6	5	1	1	127
21	17	5	3	3	2	122
22	10	7	8	4	1	111

23	5	14	7	2	2	108
24	9	11	6	3	1	114
25	8	11	7	4	0	113
26	8	15	5	1	1	118
27	10	10	7	2	1	116
28	10	13	5	1	1	120
29	4	15	8	1	2	102
30	10	13	6	0	1	121
31	12	12	5	0	1	124
32	13	13	3	0	1	127
33	12	12	5	0	1	124
34	7	11	9	2	1	111
35	10	12	4	2	2	116
Total	185	213	116	33	22	2209
Skor Ideal		30x19x5				2850
% Total Skor		2209/2850x100				77,50

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner 2019

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan jawaban responden dengan rata-rata sebesar 77,50%.

Untuk menyajikan garis kontinum (Interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), untuk tiga item pernyataan yang termasuk anggaran modal di hitung sebagai berikut:

Nilai indeks minimum = Skor minimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 1 \times 19 \times 30$$

$$= 570$$

Nilai indeks maksimum = Skor maksimum x jumlah pernyataan x jumlah responden

$$= 5 \times 19 \times 30$$

$$= 2850$$

Interval

$$= \text{Nilai indeks maksimum} - \text{nilai indeks minimum}$$

$$= 2850 - 570$$

$$= 2280$$

$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang (5)}}$$

$$= \frac{2280}{5}$$

$$= 456$$



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa pengukuran akuntabilitas keuangan memperoleh nilai sebesar 2280 yang terletak pada rentan 1938 dan 2394 dengan demikian berada pada garis interval yang berkategori **tinggi**.

Dengan demikian berdasarkan hasil angket yang di sebar oleh peneliti di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan memiliki tingkat yang tinggi.

4.1.6. Pengujian Instrument Penelitian

4.1.6.1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil analisis di dapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicapai pada

signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data $n = 30$, maka didapat r tabel sebesar 0,361.

Tabel 4. 11
Hasil Pengujian Validitas

Variabel (1)	Item (2)	r Hitung (3)	R Tabel (4)	Keterangan (5)
Perencanaan Keuangan (X1)	1	0,433	0,361	Valid
	2	0,506	0,361	Valid
	3	0,589	0,361	Valid
	4	0,660	0,361	Valid
	5	0,721	0,361	Valid
	6	0,463	0,361	Valid
	7	0,450	0,361	Valid
	8	0,663	0,361	Valid
Anggaran Modal (X2)	9	0,751	0,361	Valid
	10	0,882	0,361	Valid
	11	0,836	0,361	Valid
Perencanaan Anggaran (X)	12	0,693	0,361	Valid
	13	0,872	0,361	Valid
	14	0,828	0,361	Valid
	15	0,872	0,361	Valid
	16	0,832	0,361	Valid
Akuntabilitas Keuangan (Y)	17	0,455	0,361	Valid
	18	0,647	0,361	Valid
	19	0,580	0,361	Valid
	20	0,681	0,361	Valid
	21	0,833	0,361	Valid
	22	0,740	0,361	Valid
	23	0,712	0,361	Valid
	24	0,822	0,361	Valid
	25	0,742	0,361	Valid
	26	0,701	0,361	Valid
	27	0,825	0,361	Valid
	28	0,720	0,361	Valid
	29	0,814	0,361	Valid
	30	0,531	0,361	Valid
	31	0,662	0,361	Valid
	32	0,723	0,361	Valid
	33	0,630	0,361	Valid
	34	0,795	0,361	Valid
	35	0,787	0,361	Valid

Sumber: Hasil Perhitungan Validasi 2019

Berdasarkan hasil analisis di atas, didapat nilai korelasi itemitem yang nilainya lebih dari 0,361 sehingga dapat disimpulkan bahwa item instrument penelitian perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas tersebut berkorelasi signifikan atau dinyatakan valid.

4.1.6.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan keandalan atau ketepatan akurasi dari instrument penelitian dalam suatu ukuran. Reliabilitas instrument harus diuji untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya keakurasiannya dan konsistensinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam mengukur *Skala Likert* adalah *Cronbach Alpha*.

Menurut Ulber Silalahi (2015: 471) jika hasil uji reliabilitas menunjukkan $\alpha \geq 0,6$ maka instrument ukuran tersebut mengindikasikan *satisfactory internal consistency reliability* sehingga layak digunakan sebagai instrument ukuran dalam penelitian. Tetapi jika $< 0,6$ maka instrument ukuran tersebut mengindikasikan *unsatisfactory internal consistency reliability* sehingga tidak layak digunakan sebagai instrument ukuran untuk penelitian.

4.1.6.3. Uji Reliabilitas Perencanaan Keuangan

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Reliabilitas Perencanaan Keuangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.943	19

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Dengan pengolahan SPSS 20, maka diperoleh nilai alpha sebesar 0,943. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.. karena nilai *Cronbach Alpha* untuk perencanaan keuangan lebih besar dari 0,6 (0,943 > 0,6) artinya perencanaan keuangan dinyatakan reliabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh instrument layak digunakan ke pengujian selanjutnya.

4.1.6.4. Uji Reliabilitas Anggaran Modal

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Reliabilitas Anggaran Modal

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.704	3

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Dengan pengolahan SPSS 20, maka diperoleh nilai alpha sebesar 0,704. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Karena nilai *Cronbach Alpha* untuk anggaran modal lebih besar 0,6 (0,704 > 0,6) artinya anggaran modal dinyatakan reliabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh instrument layak digunakan ke pengujian selanjutnya.

4.1.6.5. Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan Anggaran

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Variabel Perencanaan Anggaran

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.872	5

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Dengan pengolahan SPSS 20, maka diperoleh nilai alpha sebesar 0,872. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Karena

nilai *Cronbach Alpha* untuk anggaran modal lebih besar 0,6 ($0,872 > 0,6$) artinya variabel perencanaan anggaran dinyatakan reliabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh instrument layak digunakan ke pengujian selanjutnya.

4.1.6.6. Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Keuangan

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Variabel Akuntabilitas Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.943	19

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Dengan pengolahan SPSS 20, maka diperoleh nilai *alpha* sebesar 0,943. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Karena nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel akuntabilitas keuangan lebih besar dari 0,6 ($0,943 > 0,6$) artinya variabel akuntabilitas keuangan dinyatakan reliabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh instrument layak digunakan ke pengujian selanjutnya.

4.1.7. Pengujian Hipotesis

4.1.7.1. Pengaruh Perencanaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

4.1.7.1.1. Analisis Regresi Linier Sederhana Perencanaan Keuangan dengan Akuntabilitas Keuangan

Analisis Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independen dan satu variabel dependen atau membuat prediksi dengan menggunakan satu variabel independen tunggal (Ulber Silalahi,

2012:426). Analisis regresi linier sederhana adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara dimensi dari variabel independen dengan variabel dependen yaitu perencanaan keuangan dengan akuntabilitas keuangan, anggaran modal dengan akuntabilitas keuangan, dan perencanaan anggaran dengan akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, perencanaan keuangan berlaku sebagai variabel independen dan akuntabilitas keuangan berlaku sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Program SPSS 20, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Perencanaan Keuangan dengan Akuntabilitas Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	62.137	36.634		1.696	.101
X1	.336	1.049	.060	.320	.751

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Pada Tabel 4.16 di atas, pada kolom B pada Constan (a) adalah 62.137 dan nilai perencanaan keuangan (b) adalah 0,336 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y' = a + b X \text{ atau } Y = 62.137 + 0,336X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan peningkatan karena b bertanda positif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

1. Nilai konstanta a sebesar 62.137 menyatakan bahwa jika perencanaan keuangan nilainya sebesar 0, maka nilai akuntabilitas keuangan sebesar 62.137.
2. Nilai koefisien regresi perencanaan keuangan sebesar 0,336 yang menyatakan bahwa setiap aktivitas perencanaan keuangan sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,336.

4.1.7.1.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis. Untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu perencanaan keuangan secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan =5% ($\alpha=0,05$). Uji t diolah dengan menggunakan Program SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji Parsial Perencanaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	62.137	36.634		1.696	.101
X1	.336	1.049	.060	.320	.751

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, diperoleh hasil t hitung sebesar 0,320. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha=5\%$ dengan derajat kebebasan $df = (n-2) = (30-2) = 28$, maka diperoleh untuk t tabel 1,701. Oleh karena itu $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($0,320 > 1,701$) maka H_a ditolak dan H_o diterima, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan keuangan dengan akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4.1.7.1.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya hubungan antara perencanaan keuangan dengan akuntabilitas keuangan. Koefisien determinasi diolah oleh Program SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.060 ^a	.040	-.032	14.159

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, diperoleh angka R^2 (R square) sebesar 0,040 atau 4%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independen yaitu perencanaan keuangan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebesar 4%. Sedangkan sisanya 96% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Maka dapat

diketahui nilai R square adalah sebesar 0,040 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi.

$$Cd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,040)^2 \times 100 \% = 4\%$$

Tabel 4.19
Interpretasi Nilai Koefisien Determinasi

$0\% \leq KD \leq 100\%$	Tingkat Hubungan
81% – 100%	Sangat tinggi
49% – 80%	Tinggi
17% – 48%	Cukup Tinggi
5% – 16%	Rendah tapi pasti
0% – 4%	Rendah atau lemah sekali

Sumber : Sugiyono 2011:183

Dari tabel 4.19 di atas, jelas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 4% masuk ke dalam kriteria pengaruh yang Rendah Atau Lemah Sekali sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah atau lemah sekali antara perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4.1.7.2. Pengaruh Anggaran Modal terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung

4.1.7.2.1. Analisis Regresi Linier Sederhana Anggaran Modal dengan Akuntabilitas Keuangan

Dalam hal ini, anggaran modal berlaku sebagai variabel independen dan akuntabilitas keuangan berlaku sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Program SPSS 20, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Anggaran Modal dengan
Akuntabilitas Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	72.867	10.214		7.134	.000
X2	.091	.929	.018	.098	.923

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Pada tabel 4.20 di atas, pada kolom B pada Constant (a) adalah 72,867 dan nilai anggaran modal (b) adalah 0,091 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + Bx \text{ atau } Y = 72,867 + 0,091X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan peningkatan, karena b bertanda positif. Sehingga nilai persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

1. Nilai konstanta a sebesar 72,867 menyatakan bahwa jika anggaran modal nilainya sebesar 0, maka nilai akuntabilitas keuangan sebesar 72,867.
2. Nilai koefisien regresi anggaran modal sebesar 0,091 yang menyatakan bahwa setiap aktivitas anggaran modal akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,091 satuan.

4.1.7.2.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis. Untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu anggaran modal secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan

tingkat signifikan =5% ($\alpha=0,05$). Uji t diolah dengan menggunakan Program SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	72.867	10.214		7.134	.000
X2	.091	.929	.018	.098	.923

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, diperoleh hasil t hitung sebesar 0,098. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha=5\%$ dengan derajat kebebasan $df = (n-2) = (30-2) = 28$, maka diperoleh untuk t tabel sebesar 1,701. Oleh karena itu nilai t hitung $>$ t tabel ($0,098 > 1,701$) maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran modal dengan akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4.1.7.2.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya hubungan antara anggaran modal dengan akuntabilitas keuangan. Koefisien determinasi diolah oleh Program SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.180 ^a	.324	.352	4.183

a. Predictors: (Constant), X2

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, diperoleh angka R^2 (R square) sebesar 0,324 atau 32,4%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu anggaran modal terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya 67,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Maka dapat diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,324 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi.

$$Cd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,324)^2 \times 100\% = 32,4\%$$

Tabel 4.23
Interpretasi Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

$0\% \leq KD \leq 100\%$	Tingkat Hubungan
81% – 100%	Sangat tinggi
49% – 80%	Tinggi
17% – 48%	Cukup Tinggi
5% – 16%	Rendah tapi pasti
0% – 4%	Rendah atau lemah sekali

Sumber : Sugiyono (2011:183)

Dari tabel 4.23 di atas, jelas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 32,4% masuk dalam kriteria pengaruh yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara anggaran modal terhadap akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4.1.7.3. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung

4.1.7.3.1. Analisis Regresi Linier Sederhana Perencanaan Anggaran dengan Akuntabilitas Keuangan

Dalam hal ini, perencanaan anggaran berlaku sebagai variabel independen, dan akuntabilitas keuangan berlaku sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan Program SPSS 20, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.24
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Perencanaan Anggaran dengan Akuntabilitas Keuangan

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model	(Constant)	32.032	8.926		3.589	.001
	X3	.310	.438	.133	5.986	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Pada tabel 4.24 di atas, pada kolom B pada Constant (a) adalah 32,032 dan nilai perencanaan anggaran (b) adalah 0,310 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + Bx \text{ atau } Y = 32,032 + 0,310X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan peningkatan karena b bertanda positif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

1. Nilai Constanta a sebesar 32,032 menyatakan bahwa jika perencanaan anggaran nilainya sebesar 0, maka nilai akuntabilitas keuangan sebesar 32,032.
2. Nilai koefisien regresi perencanaan anggaran sebesar 0,310 yang menyatakan bahwa setiap aktivitas perencanaan anggaran sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,310 satuan.

4.1.7.3.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji diterima atau ditolakanya hipotesis. Untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu perencanaan anggaran secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan =5% ($\alpha=0,05$). Uji t diolah dengan menggunakan Program SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 4.25
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32.032	8.926		3.589	.001
X3	.310	.438	.133	5.986	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, diperoleh hasil t hitung sebesar 5,986. tabel distribusi t dicari pada $\alpha=5\%$ dengan derajat kebebasan $df = (n-2) = (30-2) = 28$, maka diperoleh untuk t tabel sebesar 1,701 oleh karena itu nilai t hitung > t tabel

(5,986 > 1,701) maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran dengan akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4.1.7.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya hubungan antara perencanaan anggaran dengan akuntabilitas keuangan. Koefisien determinasi diolah oleh Program SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 4.26
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.698	.692	3.592

a. Predictors: (Constant), X3

Sumber: Hasil Perhitungan Program SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.26 di atas, diperoleh angka R^2 (R square) sebesar 0,698 atau 69,8%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen yaitu perencanaan anggaran terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebesar 69,8% sedangkan sisanya 30,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Maka dapat diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,698 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi.

$$Cd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,836)^2 \times 100\% = 69,8\%$$

Tabel 4.27
Interpretasi Nilai Koefisien Determinasi

$0\% \leq KD \leq 100\%$	Tingkat Hubungan
81% – 100%	Sangat tinggi
49% – 80%	Tinggi
17% – 48%	Cukup Tinggi
5% – 16%	Rendah tapi pasti
0% – 4%	Rendah atau lemah sekali

Sumber : Sugiyono (2011:183)

Dari tabel 4.27 di atas, jelas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 69,8% masuk dalam kriteria pengaruh yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4.2. Pembahasan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Mahmudi (2010:23), “Akuntabilitas yaitu sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pemberi mandate (principal). Untuk penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui oleh rakyat, jika pemerintah tidak memberi tahu kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan dana masyarakat beserta penggunaannya. Mahmudi (2011) mengemukakan salah satu

akuntabilitas public adalah akuntabilitas keuangan, dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Sedangkan Perencanaan adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Dan Anggaran sebagai perencanaan, digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*). Bastian (2010:165).

Dana yang tersedia harus digunakan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (Harun, 2009:113) yaitu penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indicator kinerja yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Setelah dilakukan perhitungan oleh penulis dengan menggunakan rumus dan bantuan dari Program SPSS 20 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan

yang positif atau terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran dan akuntabilitas keuangan.

Untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid atau tidak, maka nilai r hitung tersebut harus dibandingkan dengan nilai r tabel. Dengan $n-2 = 28$ dan taraf kesalahan 5% maka di peroleh r tabel = 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pengujian validitas menunjukkan hasil dari setiap item pertanyaan baik mengenai perencanaan anggaran dan akuntabilitas keuangan, semuanya adalah **valid** dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Berdasarkan nilai angka reliabilitas untuk perencanaan keuangan adalah 0,943 hal ini menunjukkan r hitung lebih besar dari 0,6 ($0,943 > 0,6$), untuk anggaran modal adalah 0,704 hal ini menunjukkan r hitung lebih besar dari 0,6 ($0,704 > 0,6$), untuk variabel perencanaan anggaran adalah 0,872 hal ini menunjukkan r hitung lebih besar dari 0,6 ($0,872 > 0,6$) dan untuk variabel akuntabilitas keuangan adalah 0,943 hal ini menunjukkan r hitung lebih besar dari 0,6 ($0,943 > 0,6$). Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penelitian tersebut dinyatakan **reliabel**.

Pengujian hipotesis untuk masing-masing dimensi telah dilakukan menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Untuk dimensi yang pertama yaitu perencanaan keuangan sebesar ($0,320 < 1,701$), kedua dimensi anggaran modal sebesar ($0,098 < 1,701$), dan untuk variabel perencanaan anggaran sebesar ($5,986 > 1,701$) dengan tabel distribusi t , dicari dengan taraf kesalahan 5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df ($30-2$) = 28. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi =

0,05) hasil di peroleh dari t tabel sebesar 1,701 hal ini dapat dinyatakan bahwa t hitung > t tabel dengan X_1 ($0,320 < 1,701$), X_2 ($0,098 < 1,701$), dan X ($5,986 > 1,701$). Ketentuannya bila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_a di tolak. Tetapi sebaliknya bila t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Dari hasil yang di sebutkan di atas, terlihat bahwa t hitung dari perencanaan keuangan (X_1) t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, t hitung dari anggaran modal (X_2) lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dan perencanaan anggaran t hitung (X) lebih besar daripada t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a di terima dan H_0 di tolak.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, dimensi yang pertama yaitu perencanaan keuangan memperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,040 atau (4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan keuangan memiliki pengaruh yang rendah atau lemah sekali terhadap Akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan presentase 4%. Sedangkan sisanya sebesar 96% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Dimensi yang kedua yaitu anggaran modal memperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,324 atau (32,4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran modal berpengaruh cukup tinggi terhadap Akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan presentase 32,4%. Sedangkan sisanya sebesar 67,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Kemudian mengenai variabel perencanaan anggaran yang memperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,698 atau (69,8%). Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh tinggi terhadap Akuntabilitas keuangan pada

Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan presentase 69,8%. Sedangkan sisanya sebesar 30,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian tentang Pengaruh Perencanaan Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dibuktikan dengan hasil uji t, nilai t hitung untuk perencanaan keuangan karena t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel ($0,320 < 1,701$) yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara perencanaan keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Besarnya pengaruh perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,040 atau 4% termasuk kategori rendah atau lemah sekali.
- 2) Anggaran modal terbukti tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dibuktikan dengan hasil uji t, nilai t hitung untuk anggaran modal lebih kecil daripada nilai t tabel ($0,098 < 1,701$) yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara anggaran modal terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Besarnya pengaruh anggaran modal terhadap akuntabilitas keuangan dibuktikan dengan hasil uji

koefisien determinasi sebesar 0,324 atau 32,4% % termasuk kategori yang cukup tinggi.

- 3) Perencanaan anggaran terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dibuktikan dengan hasil uji t, nilai t hitung untuk perencanaan anggaran lebih besar daripada nilai t tabel ($5,986 > 1,701$) yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara perencanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Besarnya pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,69 atau 69,8% termasuk ke dalam kategori yang tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Saran Akademik

Dalam penelitian ini ada dimensi perencanaan keuangan dan anggaran modal yang tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan, maka peneliti menyarankan kepada peneliti lain di waktu yang akan datang untuk melanjutkan penelitian mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung untuk menambah dimensi atau variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Cibiru Kota Bandung secara lebih mendalam berdasarkan fenomena yang ada guna

menghasilkan hasil penelitian baru yang berguna bagi kepentingan instansi pemerintahan.

5.2.2. Saran Praktik

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kecamatan Cibiru Kota Bandung untuk dapat lebih mengoptimalkan atau meningkatkan perencanaan anggaran terutama dalam segi perencanaan keuangan serta anggaran modalnya.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan Kecamatan Cibiru Kota Bandung untuk dapat lebih mengoptimalkan efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam perencanaan anggaran.



